

Teknologi Pemantauan Gambut Diperluas

Gubernur Bisa Bentuk Badan Restorasi Daerah

JAKARTA, KOMPAS — Badan Restorasi Gambut, didukung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi serta melibatkan Universitas Hokkaido, Jepang, menyiapkan pembangunan teknologi peringatan dini kondisi gambut di Riau. Itu akan memperkuat analisis potensi kerawanan bencana.

Selama ini, peta kerawanan bencana berupa kondisi keke-
ringan atmosfer wilayah telah di-
sediakan Badan Meteorologi, Kli-
matologi, dan Geofisika. Apabila
kedua teknologi itu dipadukan
bisa meningkatkan keakuratan
peringatan dini potensi kebakar-
an di lahan gambut.

Sarana penelitian kondisi
gambut itu telah dibangun BPPT
bersama Universitas Hokkaido
dan lembaga riset lain di Kali-
mantan Tengah sejak 2013. "Pi-
hak Jepang sudah sepakat mem-
berikan asistensi teknis dan pen-
danaan agar bisa kita aplikasikan
di Riau," kata Nazir Foad, Ke-
pala Badan Restorasi Gambut
(BRG), Jumat (11/3), di Jakarta.

Peralatan tersebut akan
mengukur dan memantau kondi-
si kelembaban gambut, tinggi
muka air, suhu, dan curah hujan.
Variabel-variabel itu akan mem-
berikan informasi potensi gam-
but terbakar. Teknologi itu telah
terpasang di Kalteng sejak 2013.

Nazir mengatakan, di Kalteng,

peralatan tersebut menggunakan
pelaporan *real time* dengan inter-
net GSM yang terhubung server
di Jepang. Namun, untuk Riau,
ia menghendaki agar server per-
alatan berada di Indonesia. Ter-
kait dengan pembangunan sara-
na serupa di provinsi lain—meng-
ingat wilayah kerja BRG juga di
Jambi, Sumatera Selatan, Kali-
mantan Barat, Papua, dan Kali-
mantan Selatan—Nazir mem-
pertimbangkan kemampuan
pendanaan.

"Pihak Jepang tidak keberatan
servernya di Indonesia. Kita ha-
nya perlu membangun protokol
apakah mau di BPPT, BNPB,
KLHK, atau di mana. Kami se-
tuju di BPPT, tidak perlu di BRG
karena lembaga kami, kan, *ad
hoc*, cuma lima tahun," ujarnya.

Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Siti Nurbaya Ba-
kar mengatakan, teknologi yang
akan dibangun BRG mendukung
sistem pencegahan dan pengem-
pangan kebakaran hutan dan la-
han yang dibangun bersama

Menteri Koordinator Politik, Hu-
kum, dan Keamanan serta Men-
teri Koordinator Perekonomian.
"Dalam satu-dua bulan ini harus
selesai. Harus bisa dipakai sebe-
lum musim kemarau tiba Mei
nanti," katanya se usai melantik
dan mengambil sumpah pejabat
eselon II, III, dan IV di Jakarta.

Ia juga memaparkan sistem
yang berlangsung saat ini kurang
baik meski sudah menunjukkan
penurunan titik panas di Riau.
"Saat ini, begitu ada api, langsung
dipadamkan. Karena itu (jumlah
titik panas) turun naik. Tapi,
masak kayak begitu terus," ujar-
nya.

Ia menyatakan, sistem baru
yang dibangunnya bersama dua
menteri koordinator akan lebih
efektif dan dikerjakan pemerin-
tah daerah hingga camat dan
desa. Selain itu, aspek sosial di-
lakukan melalui pemberdayaan
dan partisipasi masyarakat yang
disentuh dalam semacam Pro-
gram Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM).

BRG daerah

Deputi Edukasi, Sosialisasi,
Partisipasi, dan Kemitraan BRG
Myrna A Safitri mengatakan,
hingga kini program dan penye-
lesaian kelembagaan dilakukan
secara paralel. Ia berharap pada
Juli mendatang BRG telah me-
miliki rencana dan tahapan-ta-

hapan pelaksanaan restorasi
yang jelas.

Pihaknya sedang mendorong
pembentukan Badan Restorasi
Gambut Daerah sesuai dengan
perintah Peraturan Presiden No-
mor 1 Tahun 2016 tentang Pem-
bentukan BRG. pembangunan
BRG Daerah oleh gubernur se-
tempat itu untuk memudahkan
koordinasi dengan BRG.

Selain itu, pengumpulan data
konsesi beserta informasi jenis
perizinan, jangka waktu perizin-
an, kondisi tanaman dan gambut,
serta latar belakang pemberian
izin pun masih terus dikumpul-
kan. Diharapkan, data ini bisa
menjadi opsi bagi pengambilan
keputusan dalam upaya restorasi
gambut.

"Kan, tidak mungkin kalau
perkebunan sawit di gambut
yang menghidupi banyak orang
digenangi begitu saja," ucapnya.

Prosedur serupa pun dikomu-
nikasikan dengan perusahaan-
perusahaan perkebunan sawit
ataupun hutan tanaman industri.
Nazir Foad menyebutkan, pi-
haknya telah bertemu perusa-
haan yang tergabung dalam In-
donesia Palm Oil Pledge (IPOP).
"Yang disepakati langsung saat
itu, yaitu gambut yang bagus
dilindungi. Nah, yang sudah tum-
buh itu harus dibicarakan lagi.
Sudah ada kesepakatan *sharing
data*," kata Nazir. (ICI)